

# Rekomendasi IETD 2024

November 2024

Memasuki masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Indonesia dapat menggunakan momentum ini untuk menyiapkan strategi transisi energi sesuai asta cita Presiden dan mendukung target ambisius pertumbuhan ekonomi 8%, menuju Indonesia Emas 2045.

Transisi energi merupakan peluang bagi Indonesia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan menarik investasi dari pendanaan energi bersih yang secara global terus meningkat, untuk mendorong pertumbuhan bisnis dan industri energi terbarukan dan efisiensi energi di dalam negeri.

Indonesia Energy Transition Dialogue (IETD) 2024 menyorot transisi energi Indonesia dari sudut pandang berbagai aktor dan juga perubahan sistemik dari sistem energi dan implikasinya pada berbagai sektor. Berikut adalah ringkasan serta rekomendasi dari IETD 2024:

## I.

### Rekomendasi Jangka Pendek/*Quick Win*

#### 1. Menetapkan target dan peta jalan transisi energi dengan pilihan biaya yang paling murah (*cost effective*) dengan kehandalan pasokan yang optimal, dan penurunan emisi gas rumah kaca yang selaras dengan target 1,5°C.

Komitmen transisi energi perlu diperkuat dengan peningkatan target bauran energi terbarukan dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN), mengembalikan target 23% bauran pada 2025, dan meningkatkan signifikan target bauran 2030. Kebijakan Energi Nasional perlu merefleksikan arah dan dukungan yang lebih kuat untuk energi terbarukan dibandingkan sumber energi lainnya. Peningkatan kapasitas energi terbarukan akan mendorong harga energi listrik yang lebih murah dan terjangkau bagi masyarakat dan industri, serta membuka kesempatan meningkatkan elektrifikasi proses industri untuk mendukung target netral iklim di 2060 atau lebih awal. Penyusunan peta jalan transisi energi perlu memberikan transparansi pada implikasi biaya dari berbagai skenario yang dipertimbangkan agar keputusan pencapaian target merefleksikan biaya.

#### 2. Mengakselerasi penyelesaian kebijakan dan regulasi transisi energi dalam *pipeline* untuk mendukung peta jalan transisi energi Indonesia.

Beberapa kebijakan sebagai dukungan landasan transisi energi perlu diselesaikan dalam 100 hari pertama pemerintahan. Kebijakan dan regulasi ini mencakup Kebijakan Energi Nasional (KEN), Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN), peta jalan pengakhiran operasi PLTU batubara, dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL). Terkhusus untuk RUU Energi baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET), agar finalisasi kebijakan dapat dikembalikan menjadi RUU energi terbarukan, sedangkan energi baru seperti nuklir dapat difokuskan kepada RUU ketenaganukliran.

#### 3. Mengakselerasi penyelesaian kebijakan dan regulasi transisi energi dalam *pipeline* untuk mendukung peta jalan transisi energi Indonesia.

Membentuk tim dan menyusun strategi reformasi subsidi dan kompensasi energi ke dukungan sosial langsung pada kelompok rentan sampai *aspiring middle class*. Reformasi subsidi dan kompensasi

juga untuk menyetarakan kompetisi antara energi fosil dan energi terbarukan, sehingga mendukung pengembangan energi paling *affordable* sesuai kondisi pasar.

#### **4. Menerapkan reformasi kebijakan sektor ketenagalistrikan sesuai rekomendasi yang disusun dalam *Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP)*.**

Dokumen CIPP memberikan rekomendasi prioritas untuk penyesuaian regulasi ketenagalistrikan mencakup perbaikan proses pengadaan terkhusus untuk energi terbarukan, penyusunan standar acuan Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL) dengan distribusi resiko yang adil antara PLN dan swasta, penghapusan regulasi batasan atas harga batubara untuk pembangkit listrik, pengaturan ulang model pendapatan PLN agar mengakomodasi pendapatan yang *forward-looking*, mengeluarkan regulasi untuk penerapan pengakhiran operasi dini PLTU batubara serta operasi fleksibel PLTU batubara. Reformasi kebijakan ini juga memungkinkan Indonesia untuk mendorong implementasi pendanaan JETP dan pendanaan lanjutannya sesuai joint statement JETP.

#### **5. Pengentasan program dedieselisasi 5400 unit PLTD dengan total kapasitas 3,5 GW dengan pembangkit energi terbarukan setempat untuk memberikan listrik yang cukup untuk tingkat akses listrik dengan level *tier-3* (minimum 692 kWh/cap/tahun).**

Program dedieselisasi ke pembangkit energi terbarukan setempat memberikan manfaat berupa pengurangan biaya pembangkitan listrik lokal, mengurangi kebutuhan diesel dan impornya, dan meningkatkan ketahanan dan keberlanjutan energi lokal dengan kemudahan ekspansi. Rencana dedieselisasi telah mengalami penundaan dalam beberapa tahun belakang, dan butuh diakselerasi dengan target finalisasi yang jelas.

## **II. Rekomendasi Jangka Panjang**

### **1. Membangun diplomasi energi untuk menarik investasi dan transfer teknologi melalui kerjasama Selatan-Selatan.**

Tiongkok memimpin transisi energi global saat ini dengan penguasaan teknologi energi terbarukan dan kendaraan listrik. Indonesia dapat memanfaatkan hubungan baik yang sudah dibangun selama ini untuk membangun kerjasama Selatan-Selatan untuk menjadi hub transisi energi global, memanfaatkan momentum pergeseran geopolitik akibat transisi energi yang menciptakan peluang pergeseran ekonomi dari negara-negara Utara ke negara-negara Selatan.

### **2. Menciptakan *enabling environment* yang mendorong transformasi model bisnis industri dan BUMN dalam transisi energi.**

Transisi energi akan menyebabkan transformasi model bisnis industri serta BUMN yang ada di masing-masing sektor. Transformasi terjadi karena disrupsi teknologi energi bersih yang semakin murah. Peran PLN dapat berubah, tidak hanya untuk jual beli tenaga listrik tetapi memberikan jasa penyediaan dan manajemen energi dengan kualitas tinggi ke konsumen (*energy as service*) atau pemisahan fungsi operator ketenagalistrikan untuk meningkatkan utilisasi aset transmisi dan distribusi PLN. Peran perusahaan kimia yang akan menjual produk seperti hidrogen dan amonia, tidak hanya terbatas untuk pupuk, tetapi juga kebutuhan energi. Perusahaan energi fosil melakukan diversifikasi bisnis dan menanamkan investasi pada energi bersih. Dekarbonisasi industri yang mendalam juga dimungkinkan dengan saling dukungnya masing-masing industri sepanjang rantai pasok untuk mengintegrasikan energi bersih pada operasinya. Pemerintah perlu mengidentifikasi tren-tren tersebut dan menyusun kerangka regulasi pendukung sehingga menciptakan *enabling environment* untuk transformasi model bisnis industri.

### **3. Penerjemahan target pengembangan energi bersih (energi terbarukan, hidrogen) ke peta jalan pengembangan industri, pembangunan, dan penyiapan SDM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.**

Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi 8%, maka industrialisasi Indonesia perlu ditingkatkan dengan cara menarik investasi yang lebih besar untuk pengembangan industri. Dengan kebutuhan pengembangan energi terbarukan dan hidrogen hijau yang besar, maka memastikan tumbuhnya industri manufaktur lokal dapat meningkatkan *multiplier effect* dari transisi energi pada pertumbuhan ekonomi. Agar industri energi bersih tumbuh, maka pemerintah perlu menyusun paket insentif untuk pengembangan industri energi bersih domestik yang diselaraskan dengan strategi penyiapan tenaga kerja sesuai standar kompetensi yang dibutuhkan, dukungan penelitian dan inovasi teknologi rendah karbon, maupun pembangunan infrastruktur pendukung seperti jaringan listrik dan penyimpanan energi, serta fasilitas standarisasi dan tes untuk teknologi energi bersih.

### **4. Meningkatkan transparansi dan partisipasi pada pengambilan kebijakan energi dan pelibatan aktor yang luas.**

Transisi energi mempunyai dampak yang luas ke berbagai aktor. Oleh karena itu, proses penyusunan strategi dan peta jalan transisi energi perlu melibatkan aktor dan kelompok terdampak seperti bisnis & industri, pekerja, masyarakat adat, pemuda, akademisi, perempuan, media dan sebagainya. Selain itu, kanal komunikasi mengenai kebijakan transisi energi perlu dibuat lebih terjadwal dan mudah diakses oleh banyak pihak. Hal ini penting untuk memungkinkan berbagai elemen masyarakat Indonesia untuk mengantisipasi perubahan yang akan terjadi (misalnya seperti pekerja di sektor energi fosil) maupun kesempatan untuk berkolaborasi dan berinovasi untuk mengembangkan energi terbarukan dan efisiensi energi dalam kapasitas masing-masing.